

Pemkab Diadukan

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Penji menjelaskan, alasan dia melaporkan alantaraan ia menilai pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Puskesmas dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di GOR Panatayuda Selasa (7/1) malam itu, masih menyisakan masalah yang cukup serius.

“Ramainya pemberitaan di

media massa tentang mutasi tersebut cukup memperhatikan, mulai dari isu uang sampai pejabat yang dilantik dan diangkat sumpahnya, namun tidak tercantum dalam SK,” tutur Panji melalui siara pers yang diterima KBE.

“Yang kami laporkan lebih fokus kepada adanya sepuluh pejabat kepala sekolah yang mengikuti sumpah dan pelantikan namun tidak tercantum dalam lampiran SK 230/KEP.80/BKPSDM/2020. Setelah adanya saling lempar antara pejabat BKPSDM

Karawang dan Disdikpora Karawang serta ramainya pemberitaan, maka muncul lah SK baru dengan Nomor SK 230/KEP.82/BKPSDM/2020 dengan tanggal yang sama yaitu 7 Januari 2020 yang di tanda tangani Bupati Karawang,” kata dia.

Ia mengaku heran kenapa pada tanggal yang sama mengakomodir ke sepuluh kepala sekolah tersebut, “Padahal sudah jelas mereka tidak tercantum dalam SK 230/KEP.80/BKPSDM/2020, jadi kenapa harus diterbitkan lagi SK baru dengan tanggal yang sama. Padahal sepen-

gatahuan kami untuk melakukan mutasi tidak lah mudah, harus melalui pertimbangan hasil dari Baperjakat, dikonsultasikan ke KASN dan Gubernur,” tuturnya.

Panji menuturkan membuat laporan secara tertulis dengan nomor surat 288/LSMKR-LP/III/2020 tertanggal 2 maret 2020 dan untuk ke Kejaksaan Agung kami melaporkan melalui aplikasi Adhyaksa Connect.

“Ya tentu saja dengan melampirkan data-data dan petunjuk yang berhubungan dengan mutasi tersebut,” tukasnya. (yib/kbe)